

**PENCEGAHAN PENJUALAN PAKAIAN BEKAS SEBAGAI UPAYA
UNTUK MELINDUNGI PENYEBARAN PENYAKIT MENULAR
(ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 7 TAHUN 2014 DAN UU NO. 8
TAHUN 1999)**

Kintan Kartika Prameswari

ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah berkembang dalam berbagai bentuk. Ada beberapa jenis jual beli barang dan jasa, dengan barang-barang yang ditawarkan dalam berbagai kondisi, mulai dari baru hingga bekas. Salah satu contoh model bisnis daur ulang bekas adalah pakaian bekas impor yang masih layak dipakai. Namun keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia pada nyatanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dikarenakan dari praktik penjualan pakaian bekas impor ini memberikan dampak negatif, salah satunya adalah Kesehatan konsumen karena pakaian tersebut berpotensi membawa penyakit menular. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dari penyebaran penyakit dalam pelarangan penjualan pakaian bekas impor dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku penjualan pakaian bekas impor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga memakai berbagai jenis teori-teori yang memiliki nilai relevansi dan juga penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan meneliti bahan secara terstruktur dan dipelajari secara utuh. Maka dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Indonesia belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelarang penjualan pakaian bekas. Namun Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan di Indonesia mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pembelian pakaian bekas. Selain itu, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penjualan pakaian bekas impor. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menciptakan perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas Impor, Pertanggungjawaban.

**PREVENTION OF THE SALE OF USED CLOTHES AS AN EFFORT TO
PROTECT THE SPREAD OF COMMUNICABLE DISEASES
(JURIDICAL ANALYSIS OF LAW NO.7 OF 2014 AND LAW NO.8 OF 1999)**

Kintan Kartika Prameswari

ABSTRACT

As time passes, the transactions of buying and selling goods and services in society have developed in various forms. There are several types of buying and selling goods and services, with the goods offered in different conditions, ranging from new to used. One example of a business model involving the recycling of used goods is the sale of imported secondhand clothing that is still suitable for use. However, the existence of the sale of imported secondhand clothing in Indonesia is actually prohibited by Indonesian laws and regulations due to the negative impact of this practice, one of which is the health of consumers because these clothes potentially carry contagious diseases. Therefore, the aim of this research is to determine how consumer protection can be achieved regarding the spread of diseases through the prohibition of the sale of imported secondhand clothing, and what responsibilities should be undertaken by sellers of imported secondhand clothing. In this study, the author employs a normative or juridical-normative research method, and the research approach used is the legislative approach. Various relevant theories and previous studies are also utilized. The research also utilizes primary and secondary data sources, and the author employs a literature review as the method of data collection. This research employs qualitative data analysis technique, which involves examining the material in a structured and comprehensive manner. Therefore, from this research, the author concludes that the Trade Law and Consumer Protection Law aim to provide a strong legal foundation for the government to protect consumer rights. Currently, there is no specific law in Indonesia that specifically regulates the prohibition of selling secondhand clothing. However, the Consumer Protection Law and Trade Law in Indonesia regulate consumer rights and protection, including in the context of purchasing secondhand clothing. Furthermore, the Trade Law and Consumer Protection Law also govern the responsibilities of business operators in the sale of imported secondhand clothing. By fulfilling these responsibilities, business operators can contribute to creating fair, safe, and sustainable trade practices.

Keywords: Consumer Protection, Imported Used Clothing, Accountability.